

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah Desa, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang kemajuan masyarakat dan daerah. Adanya tuntutan efektifitas penggunaan sistem keuangan desa dalam pelaporan kinerja pemerintah bukan hanya bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga menjadi kewajiban pemerintah daerah termasuk dalam pemerintahan Desa.

Pemerintahan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa dijalankan oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat Desa, terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Disahkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat dikelola dengan baik.

Pemerintah juga telah menerbitkan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang efektif yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa secara efektif.

Pada masa sekarang keakuratan dalam penerapan akuntansi keuangan desa masih diragukan, karena melihat fasilitas dan kemampuan perangkat desa yang masih rendah terutama dalam hal penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Terdapat masalah rendahnya ke efektifan penggunaan sistem keuangan desa, tata kelola aparat pemerintah desa yang masih minimum, dan rendahnya evaluasi dan kegiatan pengawasan intern terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Pemerintah menyediakan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) tahun 2020 telah dialokasikan dana desa sebesar 72 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Dana ini mengalami kenaikan 2 triliun dari dana desa tahun 2019 yang hanya berkisar 70 triliun.

Dana Desa khusus Kabupaten Rokan Hulu, tahun 2022 sebesar Rp.137.819.413.000 Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki resiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya (Wiguna et al., 2017). Desa yang dianggap sebagai penerima dana tersebut, mempunyai kewajiban untuk melaporkan pelaporan penggunaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (APBDesa) dan mempertanggung jawabkannya. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak ditemukan keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai, banyak fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum.

Tabel 1.1
Dana Desa Tahun 2022 Desa Kecamatan Rambah

No	Tahun	Jumlah Dana
1	Rambah Tengah Utara	Rp. 802.000.000
2	Rambah Tengah Hilir	Rp. 934.184.000
3	Rambah Tengah Hulu	Rp. 972.387.000
4	Rambah Tengah Barat	Rp. 1.054.262.000
5	Menaming	Rp. 980.865.000
6	Pasir Baru	Rp. 671.747.000
7	Sialang Jaya	Rp. 816.748.000
8	Tanjung Belit	Rp. 872.417.000
9	Koto Tinggi	Rp. 1.022.112.000
10	Suka Maju	Rp. 940.128.000
11	Pematang Berangan	Rp. 977.785.000
12	Babussalam	Rp. 763.667.000
13	Pasir Maju	Rp.656.840.000
Total		Rp. 11.465.142.000

Sumber : Data DPMPD

Untuk mengatasi fenomena yang saat ini terjadi mengenai pengelolaan keuangan desa, pada tahun 2015 Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meluncurkan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES). Tujuannya adalah untuk membantu pemerintahan desa dalam mengelola dan memudahkan

dalam penyusunan keuangan desa sehingga aplikasi ini bisa meningkatkan mutu dan kualitas tata kelola keuangan Desa.

Sebagai sebuah sistem yang dikemas secara aplikasi berbasis pada sistem keuangan akuntansi untuk membantu pengelolaan keuangan Desa berdasarkan atas peraturan yang berlaku, maka prinsip Efektifitas didalam penggunaan SISKEUDES sangat diperlukan agar penggunaan keuangan Desa dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan, dilaksanakan dengan perencanaan sehingga pertanggung jawaban yang cepat, akurat, transparansi dan akuntabel.

Akan tetapi, efektifitas penggunaan SISKEUDES dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama yang mempengaruhi efektifitas SISKEUDES adalah peran dan tanggung jawab yang diterima oleh Desa belum diimbangi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. SDM yang terampil sangat dibutuhkan dalam suatu sistem terutama sistem komputerisasi. Oleh karena itu, aparatur desa yang bertanggung jawab atas laporan keuangan Desa dituntut bukan hanya mampu menguasai ilmu akuntansi, tetapi juga mampu menguasai ilmu komputer sehingga pelaporan pertanggung jawaban dana desa melalui aplikasi siskeudes menjadi lebih baik dan efektif. Merujuk pada penelitian Nur Oktavia Citra Rahayu (2021) yang menyimpulkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektifitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi efektifitas SISKEUDES yaitu tingkat pendidikan dan pelatihan. Mengingat aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang baru, maka diperlukannya pendidikan

dan pelatihan dalam menggunakan aplikasi SISKEUDES agar menjadi lebih efektif. Pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan yang dikembangkan dalam hidup dan kehidupan yang terjadi dalam suatu proses Pendidikan. Pelatihan adalah proses pembelajaran yang menekankan pada praktek daripada teori yang dilakukan seseorang atau sekelompok dengan menggunakan pendekatan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tertentu. Merujuk pada penelitian Nur Oktavia Citra Rahayu (2021) yang menyimpulkan bahwa pendidikan dan pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap efektifitas penggunaan sistem keuangan desa.

Faktor ketiga yaitu diperlukan peran pendamping Desa dalam menjalankan Aplikasi SISKEUDES. Peran pendamping desa merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dalam makna pembinaan, pengajaran, pengarahan, dan menemukan potensi Desa dalam menjalankan program aplikasi SISKEUDES. Mereka menjalankan fungsi sebagai penghubung pemerintah dan masyarakat dan menjadi fasilitator dalam membantu perangkat desa ketika terjadi kendala dalam pengoperasian aplikasi Siskeudes. Meski memiliki peran yang begitu penting, jumlah pendamping desa masih jauh dari ideal. Untuk Kabupaten Rokan Hulu sampai saat ini hanya memiliki sebanyak 60 pendamping desa yang tersebar di 16 Kecamatan. Tiap kecamatan akan ditempatkan minimal 3 Pendamping Desa, tapi ada juga yang empat Pendamping Desa, sesuai dengan banyaknya jumlah Desa di Kecamatan tersebut. Merujuk pada penelitian Nur Oktavia Citra Rahayu (2021)

yang menyimpulkan bahwa peran Pendamping Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap efektifitas penggunaan sistem keuangan Desa.

Selain Sumber Daya Manusia, Pendidikan Dan Pelatihan, Dan Peran Pendamping Desa, faktor yang keempat adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga dibutuhkan dalam penggunaan SISKEUDES untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam mengelola keuangan. Berdasarkan penelitian (Sindrila Dwita Eprilsa, 2021) dengan adanya pengendalian internal akan menjadi cara yang tepat untuk mengatur, mengawasi serta mengukur sumber daya pada organisasi. Sistem Pengendalian Intern mempunyai manfaat yang memadai agar tercapai efektifitas dan efesiensi pada proses akuntansi terutama dalam hal menciptakan kualitas laporan keuangan. Sejalan dengan penelitian (Sindrila Dwita Eprilsa,2021) menyimpulkan bahwa SPIP dapat berpengaruh positif terhadap efektifitas penggunaan sistem keuangan desa.

Efektivitas penggunaan SISKEUDES perlu diterapkan agar laporan keuangan Desa bisa lebih efektif sampai pada pemerintah pusat dan realisasi dalam membangun desa tidak terbengkalai. Akan tetapi masih banyak pemerintah Desa beserta aparturnya mengalami permasalahan dalam pelaporan keuangan Desa yaitu: Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada beberapa Bendahara desa ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penggunaan Siskeudes yaitu:

1. Pengiriman laporan keuangan dari desa ke Kabupaten sering terjadi keterlambatan.
2. Lemahnya komitmen pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk penerapan Siskeudes dan satuan tugas di tingkat Kabupaten/Kota .

3. Lemahnya keterampilan yang terkait dengan kreativitas laporan keuangan.
4. Infrastruktur yang lemah terkait dengan pelaporan keuangan dengan teknologi komputerisasi dan informasi yang digunakan untuk menjembatani aplikasi Siskeudes.
5. Belum memiliki sumber daya manusia atau kapasitas teknis untuk mendampingi desa-desa.
6. Banyak SDM aparatur desa yang belum paham mengenai aplikasi Siskeudes dikarenakan belum bisa menyesuaikan diri dengan sistem yang baru.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai **“PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PERAN PENDAMPING DESA, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SISTEM KEUANGAN DESA (Studi Kasus Desa di Kecamatan Rambah)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan secara parsial terhadap efektifitas penggunaan sistem keuangan Desa pada Kecamatan Rambah ?

2. Apakah Pendidikan dan pelatihan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Efektifitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa pada Kecamatan Rambah ?
3. Apakah Peran Pendamping Desa berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Efektifitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa pada Kecamatan Rambah ?
4. Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Efektifitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa pada Kecamatan Rambah?
5. Apakah Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan, Peran Pendamping Desa, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Efektifitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa pada Kecamatan Rambah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ingin diteliti oleh penulis, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Efektifitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa di Kecamatan Rambah.
2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan Pendidikan dan Pelatihan terhadap Efektifitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa di Kecamatan Rambah.

3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan Peran Pendamping Desa terhadap Efektifitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa di Kecamatan Rambah.
4. Untuk mengetahui pengaruh signifikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Efektifitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa di Kecamatan Rambah.
5. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan, Serta Peran Pendamping Desa Terhadap Efektifitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa di Kecamatan Rambah.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan program sarjana satu (S1) Akuntansi serta dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis tentang Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan Dan Pelatihan, Peran Pendamping Desa, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektifitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa Pada Kecamatan Rambah.

2. Bagi Akademis

Memberikan bukti empiris terutama mengenai Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan, Peran Pendamping Desa, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektifitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa, juga dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk disempurnakan pada penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak meluas maka penelitian ini memiliki batasan masalah yaitu Desa yang diteliti penulis adalah Desa yang ada di Kecamatan Rambah yang telah menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Nur Oktavia Citra Rahayu (2021) dengan judul “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan, serta Peran Pendamping Desa terhadap Efektifitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Studi Pada Desa di Kecamatan Kepenuhan)”. Hasil penelitian sebelumnya ini menunjukkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektifitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Pendidikan dan Pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap Efektifitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa, serta Peran Pendamping Desa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Efektifitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah :

1. Penelitian sebelumnya diteliti pada tahun 2021 sedangkan penelitian ini penulis teliti pada tahun 2022.
2. Penelitian sebelumnya dilakukan di Kecamatan Kepenuhan sedangkan penelitian ini penulis teliti di Kecamatan Rambah.
3. Jumlah variabel sebelumnya menggunakan 4 variabel sedangkan pada penelitian saya ini ada penambahan menjadi 5 variabel

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal ini terdiri dari tiga bab yakni :

BAB I : PENDAHULUAN

Yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, penelitian relevan yang menjadi referensi penulis, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi hasil, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 Teori Kontigensi (*Contogency Theory*)

Teori kontigensi adalah teori organisasi yang mengklaim bahwa tidak ada cara terbaik untuk mengatur korporasi, memimpin perusahaan, atau membuat keputusan (Ghozali, 2020). Teori kontigensi adalah teori yang menyatakan bahwa dalam mengatur sebuah organisasi tidak ada cara yang paling tepat melainkan tergantung pada situasi dari organisasi itu sendiri, baik situasi dari dalam maupun dari luar organisasi. Dalam teori kontigensi, efektivitas sebuah perusahaan timbul karena adanya penyesuaian karakteristik perusahaan dengan karakteristik-karakteristik lain yang dapat mencerminkan perusahaan tersebut. Teori ini sejalan dengan hubungan antara efektivitas suatu sistem yang mengacu pada kinerja. Kinerja dalam hal ini termasuk dalam kinerja sumber daya manusia yang mengoperasikan sebuah sistem tersebut, dimana ketika kinerja sumber daya manusia tersebut baik maka sebuah sistem juga akan terlaksana dengan baik. Kualitas sumber daya manusia sangat diperlukan dalam penggunaan suatu sistem (Wiguna et al., 2017).

2.1.2 Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefenisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Pendapat Emerson (2014) yang menyatakan bahwa

“efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (2016) yang menjelaskan bahwa “efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai , makin tinggi efektivitasnya”.

Menurut Abdurrahmat (2013), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan (Pekei, 2016). Efektivitas merupakan keberhasilan suatu operasi atau kegiatan dalam mencapai sasaran yang ditentukan. Efektivitas ini memberikan hasil yang memuaskan dan memiliki pengaruh yang besar kepada masyarakat atas pencapaian keberhasilan tersebut. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi artinya apabila suatu organisasi telah mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif (Mardiasmo, 2017).

Menurut pendapat Mahmudi (2013) mendefenisikan efektivitas, sebagai hubungan anantara output dengan tujuan, maka semakin besar ontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi,

program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (Hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.

Dari beberapa pendapat diatas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

2.1.3 Sistem Informasi

Sistem informasi adalah cara-cara yang diorganisasikan untuk mengumpulkan, memasukkan dan mengelola serta menyimpan data, mengendalikan dan melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Krismiaji, 2015).

Eksistensi dapat diperoleh agar tercapainya tujuan dalam suatu organisme sehingga membutuhkan informasi yang cukup. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian dari mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk mendapat laporan-laporan yang diperlukan oleh pihak luar (Sutabri, 2012).

Menurut Romney dan Steinber (2015), sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan juga memproses data menjadi informasi yang berguna dalam membantu proses pengambilan keputusan. Adapun beberapa fungsi sistem informasi akuntansi menurut Romney dan Steinber (2015) adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan dan memproses data tentang aktivitas bisnis organisasi secara efisien dan efektif.
2. Memberikan informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Menyediakan pengendalian yang memadai dalam menjaga aset-aset organisasi termasuk data organisasi, serta untuk memastikan bahwa data tersebut tepat pada saat dibutuhkan, akurat dan andal.

2.1.4 Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

Sistem informasi akuntansi adalah suatu subsistem dari sistem informasi manajemen (SIM) yang menyediakan informasi dan keuangan, juga informasi lain yang diperoleh dari pengolahan rutin atas transaksi akuntansi (Jones, 2011). Kinerja SIA yaitu penilaian terhadap pelaksanaan SIA yang digunakan pada suatu perusahaan dalam pencapaiannya memberikan informasi akuntansi keuangan yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Krismiaji (2015), sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan dan mengoperasikan bisnis. Dalam upaya ini faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja SIA sangat berpengaruh terhadap kualitas informasi yang dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak yang membutuhkan informasi dan penentuan kesuksesan perusahaan (Anggraeni, 2012).

Kemudian tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah mengelola dan menyimpan data seluruh transaksi keuangan, memproses data keuangan menjadi

informasi dalam pengambilan keputusan, pengawasan terhadap seluruh aktivitas keuangan, serta penyajian keuangan yang sistematis dan akurat dalam periode akuntansi yang tepat. Sedangkan untuk komponen-komponen sistem informasi akuntansi adalah sumber daya manusia yang terlatih, prosedur keuangan, dan akuntansi, formulir data keuangan, aplikasi akuntansi, serta perangkat keras berupa komputer yang terhubung dengan jaringan.

2.1.5 Pengertian Desa

Menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1, Desa adalah Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.6 Sejarah SISKEUDES

Dalam rangka mengantisipasi penerapan UU No.6 Tahun 2014, tentang Desa pengembangan aplikasi sistem keuangan desa telah dipersiapkan sejak awal, diikuti dengan adanya perhatian yang lebih dari komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI maupun komisi pemberantas korupsi. Pada tanggal 13 Juli 2015, aplikasi sistem keuangan desa SISKEUDES yang awalnya bernama SIMDA launching sebagai jawaban atas pertanyaan yang ada di Rapat Depan Pendapat (RDP) komisi XI pada tanggal 30 Maret 2015, yang menyatakan tentang kepastian waktu yang penyelesaian aplikasi yang dibangun oleh BPKP serta

memenuhi rekomendasi KPK untuk menyusun sistem keuangan desa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri.

SISKEUDES sebagai salah satu sistem informasi dengan fitur-fitur yang dibuat sederhana dengan User friendly sehingga mudah untuk digunakan. Aplikasi ini dapat menghasilkan output berupa laporan-laporan yang sesuai dengan perundang-undangan seperti Dokumen Penata Usahaan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Setoran Pajak (SSP), dll. Aplikasi ini juga memiliki beberapa kelebihan yaitu aplikasi dilengkapi dengan sistem pengendalian intern (Built-in Internal Control), dan didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi. Oleh karena itu, penggunaan SISKEUDES ini ditunjukkan untuk meningkatkan kemudahan dalam hal pencatatan, penyusunan, dan pelaporan keuangan Desa. Dengan begitu, kualitas laporan keuangan Desa bisa meningkat.

2.2 Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Hullah dkk, 2011). Sumber daya manusia memerankan peran penting dalam skala kecil maupun besar. Pada setiap organisasi, besar maupun kecil, kunci keberhasilan utama bagi organisasi tersebut terletak pada kualitas sumber daya manusia yang mengendalikan dan menjalankannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga.

Hal yang sama dikemukakan oleh Anggraeni (2013) di mana sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam organisasi hal ini karena manusia yang merencanakan sampai mengawasi pelaksanaan kegiatan dalam organisasi, di mana sumber daya manusia tersebut harus cukup jumlahnya sesuai kebutuhan serta memiliki keterampilan yang memadai sesuai tuntutan tugas-tugas dalam organisasi.

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya bekal pendidikan pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Widodo,2001) dalam Aprianti, (2011). Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Kemudian dipaparkan oleh Rahardjo (2010) menjelaskan pengertian Kualitas Sumber Daya Manusia yaitu kualitas sumber daya manusia itu hanya ditentukan oleh aspek keterampilan atau kekuatan tenaga fisiknya saja, akan tetapi juga ditentukan oleh pendidikan atau kadar pengetahuannya pengalaman atau kematangannya dan sikapnya serta nilai-nilai yang dimilikinya. Pengertian yang dikemukakan oleh Sumarjan (2009) yang dikutip oleh Danim (2012) bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia yang kita inginkan dibedah atas dasar kualitas fisik (kesehatan, kekuatan jasmani, keterampilan dan ketahanan) dan kualitas non fisik (kemandirian, ketekunan, kejujuran dan akhlak).

Pengertian kualitas menurut Sedarmayanti (Sedarmayanti, 2009:59) adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh telah dipenuhi berbagai persyaratan, spesifikasi, dan harapan.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa kualitas sumber daya manusia adalah individu dalam organisasi yang memberikan sumbangan berharga pada pencapaian tujuan organisasi dengan aspek keterampilan yang ditentukan oleh tingkat pendidikan, kejujuran, dan pengalaman.

Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia berdasarkan penelitian Nur Oktavia Citra Rahayu (2021) adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Diri
2. Profesional
3. Penguasaan Teknologi
4. Jenjang Pendidikan
5. Keahlian

2.3 Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan yang dikembangkan dalam hidup dan kehidupan yang terjadi dalam suatu proses pendidikan (Fuad, 2011). Berdasarkan SK Menpan No. 01/Kep/M. Pan/2001, pelatihan adalah proses pembelajaran yang lebih menekankan pada praktek daripada teori yang dilakukan seseorang atau sekelompok dengan menggunakan

pendekatan pelatihan untuk orang dewasa dan bertujuan meningkatkan dalam satu atau beberapa jenis keterampilan tertentu.

Pendidikan merupakan proses penyampaian nilai atau tatanan ideal dari pendidik kepada peserta didik dengan tujuan utama agar peserta didik memperoleh IPTEK yang dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya (Suherman, 2012). Pelatihan merupakan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pembelajar/peserta, untuk menjalankan pekerjaan mereka saat ini. Pelatihan harus memberikan dampak yang bersifat segera dan sangat spesifik terhadap hasil kerja dan harus didasarkan atas kebutuhan organisasi dan budaya organisasi yang khas (Marwansyah, 2012). Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) merupakan suatu program yang diharapkan dapat memberikan rangsangan atau stimulus kepada seseorang untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam pekerjaan tertentu, memperoleh pengetahuan umum, dan pemahaman.

Pendidikan atau sering disebut dengan jenjang pendidikan menurut Yuniarsih (2013) adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Tingkat pendidikan seorang pegawai menunjukkan tingkat pengetahuan dan pemahamannya untuk menjalankan tugas-tugas yang dihadapi secara efisien. Pengetahuan dan pemahaman pegawai akan pelaksanaan kerja sangat menentukan dalam usaha mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan. Dengan pendidikan formal yang memadai pegawai bagian keuangan akan lebih mudah mengerti dan memahami pekerjaan yang harus dilakukan. Maka semakin

tinggi tingkat pendidikan seorang pegawai dan dengan latar belakang pendidikan akuntansi akan sangat membantu dalam membuat laporan keuangan (Sutrisno,2012). Indikator untuk mengukur keberhasilan pendidikan dan pelatihan menggunakan indikator pada penelitian Nur Oktavia Citra Rahayu (2021) yaitu:

1. Program pelatihan dan pendidikan mengajarkan pemakaian sistem
2. Program pelatihan dan pendidikan mengajarkan sistem komunikasi
3. Keuntungan dari program pelatihan dan pendidikan
4. Program pelatihan dan pendidikan dalam mencapai keberhasilan kinerja
5. Program pendidikan sesuai jabatan dan bagian

2.4 Peran Pendamping Desa

Menurut peraturan menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia nomor 3 tahun 2015 pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi. Pengorganisasian, pengarahan dan fasilitas desa. Pendampingan merupakan suatu strategi yang digunakan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu mengidentifikasi permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, pemerintah mewajibkan kepada desa untuk mencatat seluruh proses keuangan desa melalui aplikasi Siskeudes. Sebagai tugas utama pendamping desa adalah mendampingi Desa salah satunya adalah dalam hal penganggaran, termasuk mendampingi penginputan Siskeudes (Wiguna et al., 2017). Peran pendamping desa adalah kegiatan melakukan tindakan pemberdayaan melalui

asistensi, pengoperasian, pengarahan dan fasilitasi desa (PERMENDAGRI No.18 Tahun 2019 pasal 1 ayat 1) tentang peran pendamping desa. Indikator untuk peran pendampingdesa dalam penelitian ini menggunakan indikator yang digunakan dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Oktavia Citra Rahayu (2021):

1. Perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan
2. Pengembangan SISKEUDES
3. Peningkatan kemampuan pemerintah desa
4. Pengorganisasian
5. Koordinasi pendamping

2.5 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Menurut peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang kemudian disingkat menjadi SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

SPIP sebagai pengendalian atas penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai

tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamatan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.5.1 Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari :

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait
- i. Penilaian risiko

2. Penilaian Resiko

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko terdiri atas: identifikasi risiko dan analisis risiko, pimpinan instansi pemerintah

menetapkan penilaian risiko dalam rangka tujuan instansi pemerintah yaitu memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu kemudian wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Tujuan instansi pemerintah dapat terwujud apabila pimpinan instansi pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten, strategi manajemen terintegrasi, rencana penilaian risiko, dan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah.
- b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko.
- c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah.
- d. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis.
- e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis.
- f. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memsadikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan secara efektif, untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya.

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.
- b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian internal. Pemantauan sistem pengendalian internal dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

2.5.2 Indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Penerapan unsur SPIP dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah. Terdapat 5 indikator yang digunakan untuk mengukur sistem pengendalian internal yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai Negara sebagaimana yang juga telah digunakan dalam penelitian Sindrila Dwita (2021) yang meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Resiko

3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan Pengendalian Intern

2.6 Sistem Keuangan Desa

Sistem keuangan desa merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah yang diperuntukkan untuk pengelolaan keuangan Desa secara terkomputerisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dalam pengelolaan keuangan desa. Sistem keuangan Desa bertujuan untuk memudahkan Desa dalam melakukan pencatatan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran. Sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan dengan memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan desa. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan dan bertanggung jawab, diperlukan pengaturan mengenai pertanggungjawaban keuangan desa.

Sistem keuangan khusus untuk pemerintah Desa untuk mengelola keuangan desa adalah aplikasi sistem keuangan Desa aplikasi Siskeudes adalah aplikasi yang berkonsep akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa. Aplikasi sistem keuangan Desa dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri) untuk meningkatkan tata kelola keuangan Desa dan perwujudan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa. Aplikasi sistem

keuangan Desa dibuat sederhana, mudah dioperasikan dan dilengkapi fitur-fitur sesuai kebutuhan. Aplikasi Siskeudes memudahkan pengelolaan keuangan Desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan atau pertanggungjawaban.

2.7 Penelitian Relevan

Hasil penelitian yang relevan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1
Review Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nur Oktavia Citra Rahayu (2021)	Pengaruh kualitas sumber daya manusia, Pendidikan dan pelatihan, serta peran pendamping desa terhadap efektifitas penggunaan sistem keuangan desa	X1 = Kualitas Sumber Daya Manusia X2 = Pendidikan dan Pelatihan X3 = Peran pendamping desa Y = Efektifitas penggunaan sistem keuangan desa	Kuantitatif	Dengan uji Bersama-sama Kualitas sumber daya manusia,pendidikan dan pelatihan,serta peran pendamping desa terhadap efektifitas penggunaan sistem keuangan desa

					berpengaruh secara simultan(Bersama-sama).
2	Sindrila Dwita Eprilsa (2021)	Analisis kualitas sumber daya manusia, dan Sistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP) terhadap efektifitas penggunaan sistem keuangan desa (SISKEUDES)	X1 = Kualitas sumber daya manusia X2 = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SP IP) Y = Efektifitas penggunaan sistem keuangan desa	Metode Kuantitatif, Analisis data menggunakan bantuan SPSS 25	Terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap efektifitas penggunaan sistem keuangan desa.

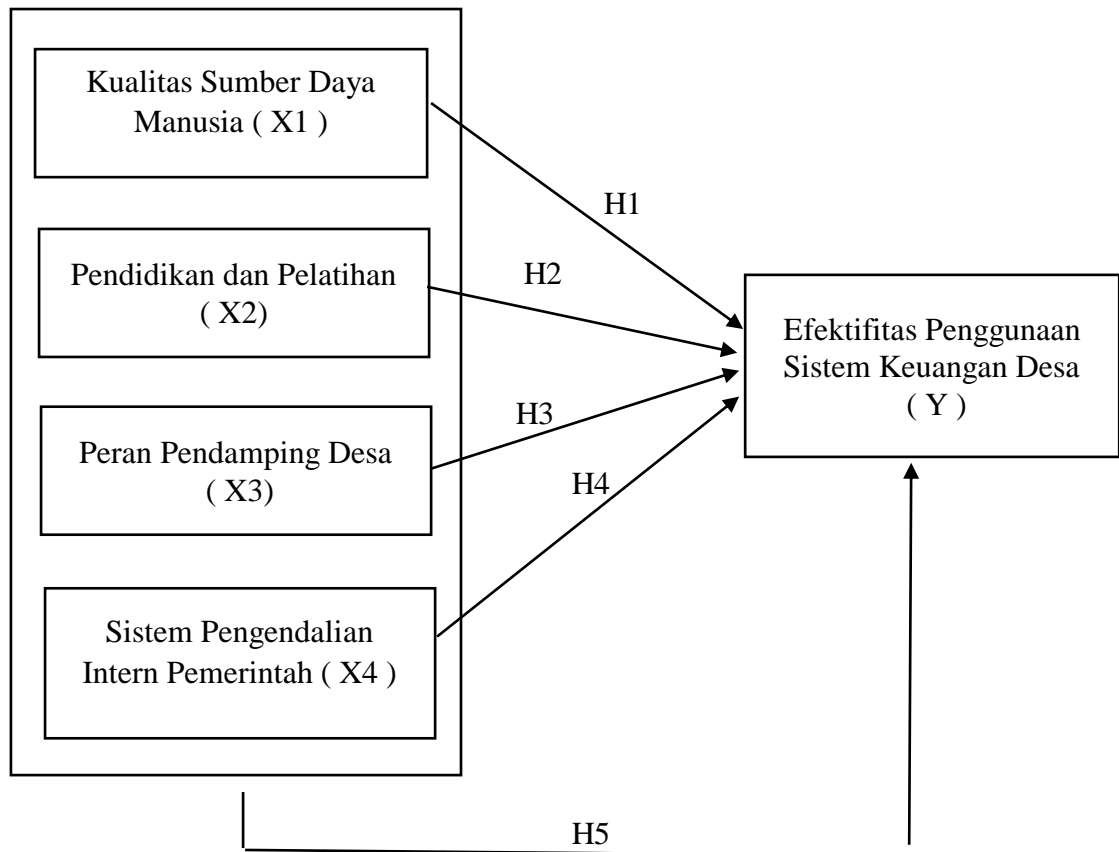
3	Sarah Wulan D.A.A.P, Yohana Febiani Angi, Sarinah Joyce M.Rafael	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan Dan Pelatihan, Serta Ketersediaan Pendamping Desa Terhadap Efektivitas Sistem Keuangan Desa	X1= Kualitas Sumber Daya Manusia X2= Pendidikan Dan Pelatihan X3= Ketersediaan Pendamping Desa Y= Efektivitas Sistem Keuangan Desa	Pendekatan yang digunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang didapatkan dari penyebaran kuesioner.	Dalam penelitian ini kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas sistem keuangan desa,namun tidak signifikan.Pendi dikan dan pelatihan berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas sistem keuangan desa,dan ketersediaan pendamping desa tidak berpengaruh
---	--	---	---	--	---

					terhadap efektivitas sistem keuangan desa
4.	Wiguna (2017)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan, serta Peran Pendamping Desa terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa.	X1=Kualitas SDM X2=Pendidika n dan Pelatihan X3=Peran Pendamping Desa Y=Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa		Dalam penelitian ini variabel kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap efektivitas penggunaan Siskeudes, variabel pendidikan dan pelatihan berpengaruh

					signifikan,dan pendamping desa berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penggunaan siskeudes
--	--	--	--	--	---

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian ini digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.9 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara yang diformulasikan oleh peneliti atas dasar teori, yang kebenarannya masih dibutuhkan adanya pembuktian secara empiris (Chandrarin, 2018).

2.9.1 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa

Kualitas sumber daya manusia merupakan seseorang yang bekerja atau sebagai anggota organisasi yang dapat disebut sebagai karyawan yang memiliki

kemampuan keterampilan pengetahuan dan moral yang tinggi dalam menyelesaikan pekerjaannya. Keberhasilan suatu organisasi pemerintah daerah ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang saling berinteraksi dan mengembangkan organisasi yang bersangkutan. Semakin baik kualitas SDM, maka semakin baik pula keterandalan pelaporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah melalui aplikasi Siskeudes.

Penelitian sebelumnya oleh (Nur Oktavia Citra Rahayu, 2021) menyatakan bahwa Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan sistem keuangan desa.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti membuat hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Diduga Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap efektifitas penggunaan sistem keuangan desa.

2.9.2 Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Penggunaan Sistem Keuangan Desa

Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan, pengalaman ataupun perubahan sikap seseorang untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam pekerjaan tertentu sehingga pegawai dapat berkompetensi dalam melakukan pekerjaan. Untuk menunjang efektivitas penggunaan Siskeudes, pemerintah kabupaten mengadakan program pendidikan dan pelatihan kepada pemerintah Desa. Program pendidikan dan pelatihan ini dilakukan guna meningkatkan keterampilan teknis. Dengan adanya pendidikan dan pelatihan perangkat desa dapat memahami strategi

perencanaan realisasi anggaran, sehingga proses penggunaan aplikasi Siskeudes di lapangan mudah mencapai target anggaran yang ditetapkan. Karena aplikasi Siskeudes merupakan aplikasi yang baru dan sifatnya selalu diperbaharui. Sehingga dengan keadaan ini mengharuskan pemakai aplikasi Siskeudes harus mendapatkan, ikut dan berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan baik secara lisan maupun tertulis.

Penelitian sebelumnya oleh (Nur Oktavia Citra Rahayu, 2021) menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan sistem keuangan Desa.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti membuat hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Diduga Pendidikan dan Pelatihan berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa.

2.9.3 Pengaruh Peran Pendamping Desa Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa

Pendamping desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitas Desa. Kementerian Desa dan transmigrasi memandang perlu untuk melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengelolaan tenaga pendamping profesional. Teori kepatuhan diterapkan pada pemerintahan yang semakin besar dan kompleksnya tugas pemerintahan desa. Oleh karena itu, peran pendamping Desa dituntut untuk membantu pelaksanaan penyaluran dan pemanfaatan dana desa sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengelolaan Desa. Peran pendamping desa

sangat penting ketika terjadi suatu kendala yang dialami pemakai sistem dalam pengoperasian Siskeudes sehingga dapat sejalan dengan tujuan adanya pendamping desa yaitu meningkatkan kapasitas, efektivita, dan akuntabilitas pemerintahan desa.

Penelitian sebelumnya oleh (Nur Oktavia Citra Rahayu, 2021) menyatakan bahwa peran pendamping Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti membuat hipotesis sebagai berikut:

H₃ = Diduga Peran Pendamping Desa berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa.

2.9.4 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan efektif makadibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai terkait pelaporan pengelolaan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai pengawasan untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efektif. Implementasi SPIP dilakukan di lingkungan instansi pemerintah diwujudkan dalam bentuk adanya proses perencanaan pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggungjawaban. Implementasi SPIP bertujuan agar pengelolaan keuangan dilakukan secara efektif dan transparan baik dalam pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jika sistem

pengendalian intern pemerintah semakin baik penerapannya maka efektivitas pengelolaan keuangannya akan semakin baik pula, karena dalam pengelolaan keuangan yang baik dibutuhkan penerapan sistem akuntansi yang efektif dan efisien.

Penelitian sebelumnya oleh (Sindrila Dwita Eprilsa, 2021) menyatakan bahwa Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti membuat hipotesis sebagai berikut:

H₄ = Diduga Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa.

2.9.5 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan, Peran Pendamping Desa, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa.

Simultan merupakan sesuatu yang terjadi atau dilakukan pada waktu yang bersamaan yang tidak saling menunggu (Dr.Aso Sentana,2006). Simultan adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel-variabel bebas jika digabungkan terhadap variabel terikat. Dalam istilah statistik pengaruh simultan sendiri digambarkan dengan uji F.

Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut: jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan ke empat variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai

signifikan $< 0,005$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan ke empat variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Ketentuan dan penerimaan hipotesis dapat juga dilakukan dengan cara melihat F hitung dan F tabel. (Ghozali, 2013)

Berdasarkan uraian diatas, peneliti membuat hipotesis sebagai berikut:

H₅ = Diduga Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan, Peran Pendamping Desa, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Efektifitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian dengan mengambil objek penelitian pada Desa yang ada di Kecamatan Rambah sebanyak 13 desa. Alasan mengambil penelitian di Desa di Kecamatan Rambah karena Kecamatan Rambah termasuk penerima dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat yang telah diberikan pelatihan dan peran pendamping desa.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Pendekatan Kuantitatif yaitu pendekatan yang menekankan analisis pada data-data angka yang diolah dengan metode statistik, sehingga data-data yang diperoleh bisa diperhitungkan dengan menggunakan angka sesuai dengan datanya. Menurut Sugiyono (2020) penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme (benar-benar terjadi) (Aldino, 2017). Metode ini digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan bersifat kuantitatif untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2020). Populasi dapat memberikan informasi atau data yang berguna bagi suatu penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Perangkat Desa di Kecamatan Rambah sebanyak 13 Desa dan 1 Kelurahan.

3.3.2 Sampel

Dalam menentukan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Dimana sampel ditentukan dengan kriteria-kriteria yang dibutuhkan pada penelitian. Maka didapatkan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 13 Desa dengan 39 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan Desa. Kriteria penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pegawai/Perangkat Desa yang telah menggunakan aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan laporan Keuangan Desa di Kecamatan Rambah.
2. Pegawai/Perangkat Desa yang terlibat dalam pengelolaan dan penyusunan anggaran dana Desa di Kecamatan Rambah, seperti : Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan Desa.

Adapun daftar nama sampel dapat dilihat tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Daftar Sampel Penelitian

No	Nama Desa	Jumlah
1	Babussalam	3 Orang
2	Koto Tinggi	3 Orang
3	Menaming	3 Orang
4	Pasir Baru	3 Orang
5	Pasir Maju	3 Orang
6	Pematang Berangan	3 Orang
7	Rambah Tengah Hilir	3 Orang
8	Rambah Tengah Hulu	3 Orang
9	Rambah Tengah Utara	3 Orang
10	Rambah Tengah Barat	3 Orang
11	Sialang Jaya	3 Orang
12	Suka Maju	3 Orang
13	Tanjung Belit	3 Orang
Total		39 Orang

Sumber : Data DPMPD

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang terdiri dari data non angka yang bersifat deskriptif, berupa gambaran umum perusahaan, struktur organisasi perusahaan, visi dan misi, serta data-data lain yang dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian ini.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dan melalui kuesioner. Wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi seputar efektifitas penggunaan sistem keuangan desa pada perangkat kantor kepala desa. Selanjutnya kuesioner yang dibawa ke lokasi diberikan kepada responden.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuisisioner (*quistionnare*) adalah desain pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya dimana responden akan mencatat jawaban mereka, biasanya dalam alternative yang didefenisikan dengan jelas (Sekaran & Bougie, 2017). Penilaian atas responden menggunakan skala Likert dan menghasilkan pengukuran variabel dalam skala interval yaitu:

SS (Sangat Setuju)	5
S (Setuju)	4
KS (Kurang Setuju)	3
TS (Tidak Setuju)	2
STS (Sangat Tidak Setuju)	1

3.6 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

Variabel pada penelitian ini terdapat 5 (lima) variabel, yang terdiri dari 4 (empat) variabel independen dan 1 (satu) variabel dependen. Adapun masing-masing variabelnya, yaitu variabel independen terdiri dari Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan, Peran Pendamping Desa, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Variabel dependennya adalah Efektiitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa. Berikut uraian defenisi dari masing-masing variabel yang digunakan dengan operasional, yaitu:

1. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa. Efektivitas penggunaan SISKEUDES adalah tingkat keberhasilan yang dicapai dalam rangka mencapai tujuan dari penggunaan SISKEUDES. Indikator Efektivitas penggunaan SISKEUDES yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan indikator yang digunakan dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Oktavia Citra Rahayu (2020):

- a) Efektivitas dan produktivitas
- b) Kualitas pengambilan keputusan
- c) Tanggung Jawab
- d) Kinerja Organisasi

2. Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kualitas Sumber Daya Manusia (X_1)

Kualitas sumber daya manusia adalah tingkatan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki individu untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan indikator yang digunakan dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Oktavia Citra Rahayu (2020):

- a) Pengembangan diri
- b) Professional
- c) Penguasaan teknologi
- d) Jenjang pendidikan

e) Keahlian

b. Pendidikan dan Pelatihan (X₂)

Menurut Sahangamu, (2014:51) adalah suatu program yang dirancang untuk dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan pemahaman pekerja (pegawai) terhadap keseluruhan lingkungan kerjanya. Adapun Indikator pelatihan yang digunakan dalam penelitian ini sama seperti indikator yang digunakan pada penelitian terdahulu oleh Nur Oktavia Citra Rahayu (2020):

- a) Program pelatihan dan pendidikan mengajarkan pemakaian sistem yang benar
- b) Program pelatihan dan pendidikan mengajarkan sistem komunikasi
- c) Keuntungan dari program pelatihan dan pendidikan
- d) Program pelatihan dan pendidikan dalam pencapaian keberhasilan kinerja
- e) Program pendidikan sesuai jabatan dan bagian

c. Peran Pendamping Desa (X₃)

Pendampingan masyarakat desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Desa. (PERMENDAGRI No.18 Tahun 2019) tentang peran pendamping desa. Indikator untuk peran pendamping desa dalam penelitian ini sama seperti indikator yang digunakan pada penelitian terdahulu oleh Nur Oktavia Citra Rahayu (2020):

- a) Perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan
- b) Pengembangan SISKEUDES
- c) Peningkatan kemampuan pemerintah desa
- d) Pengorganisasian

e) Koordinasi pendamping

d. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (X₄)

Menurut peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang digunakan ini sama seperti indikator yang digunakan pada penelitian terdahulu oleh Sindrila Dwita Eprilsa (2021) :

- a) Lingkungan Pengendalian
- b) Penilaian Resiko
- c) Kegiatan Pengendalian
- d) Informasi dan Komunikasi
- e) Pemantauan Pengendalian Intern

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Pernyataan	Skala Pengukuran
Kualitas Sumber Daya Manusia (X ₁) Sumber : (Nur Oktavia Citra Rahayu,2021)	1. Pengembangan Diri 2. Profesional 3. Penguasaan Teknologi 4. Jenjang Pendidikan 5. Keahlian	<p>1. Saya mampu melakukan perubahan dalam segala bidang, terutama perilaku dan kemampuan mengembangkan diri.</p> <p>2. Saya memahami setiap pekerjaan yang diberikan dan siap melakukan pengembangan kemampuan yang saya miliki</p> <p>3. Saya menguasai teknologi sesuai dengan pekerjaan saya</p> <p>4. Dalam melaksanakan pekerjaan saya didukung oleh pengetahuan atau latar belakang</p>	Skala Interval (1-5)

		Pendidikan yang sesuai 5. Saya diberikan kewenangan pekerjaan atas dasar Pendidikan yang saya miliki	
Pendidikan dan Pelatihan (X ₂) Sumber : (Nur Oktavia Citra Rahayu,2021)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pelatihan dan pendidikan mengajarkan pemakaian sistem 2. Program pelatihan dan pendidikan mengajarkan sistem komunikasi 3. Keuntungan dari program pelatihan dan pendidikan 4. Program pelatihan dan pendidikan dalam mencapai keberhasilan kinerja 5. Program pendidikan sesuai jabatan dan bagian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat saya bekerja memiliki program pelatihan dan Pendidikan guna mengajarkan cara sistem keuangan desa (SISKEUDES) yang benar 2. Saya telah mendapatkan program pelatihan dan Pendidikan mengenai sitem keuangan desa (SISKEUDES), sehingga saya merasa harus memahami Bahasa, prosedur dan data secara efektif 3. Banyak keuntungan 	Skala Interval (1-5)

		<p>yang saya dapat dari program pelatihan dan Pendidikan yang diadakan</p> <p>4. Pelatihan dan Pendidikan system keuangan desa (SISKEUDES) yang diberikan sangat mempengaruhi keberhasilan saya dalam melaksanakan pekerjaan saya</p> <p>5. Tempat saya bekerja mempunyai kebijakan dalam pelatihan dan Pendidikan sebagai praktik sumber daya manusia sesuai dengan jabatan dan bagiannya</p>	
Peran Pendamping Desa (X ₃)	1. Perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan	1. Menurut saya pendamping desa berperan mendampingi	Skala Interval (1-5)

<p>Sumber : (Nur Oktavia Citra Rahayu,2021)</p>	<p>2. Pengembangan SISKEUDES</p> <p>3. Peningkatan kemampuan pemerintah desa</p> <p>4. Pengorganisasian</p> <p>5. Koordinasi pendamping</p>	<p>desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap penggunaan SISKEUDES</p> <p>2. Menurut saya pendamping desa berperan dalam penyampaian keterbaharuan informasi SISKEUDES</p> <p>3. Menurut saya pendamping desa berperan dalam meningkatkan kapisistas bagi pemerintah desa dan penggunaan SISKEUDES</p> <p>4. Menurut saya pendamping desa berperan mendampingi desa dalam pengorganisasian</p>	
---	---	--	--

		<p>penggunaan</p> <p>SISKEUDES</p> <p>5. Menurut saya pendamping desa berperan dalam memberikan solusi dari permasalahan di desa dan mampu memfasilitasi dan menjembatani kepada pemerintah atau pihak lain (Swasta) jika diperlukan baik dalam hal pengelolaan keuangan, pelaporan, ataupun pertanggung jawaban keuangan desa</p>	
<p>Sistem Pengendalian iIntern Pemerintah (SPIP) (X₄)</p>	<p>1. Lingkungan Pengendalian</p> <p>2. Penilaian Resiko</p> <p>3. Kegiatan Pengendalian</p> <p>4. Informasi dan Komunikasi</p>	<p>1. Komunikasi telah dilaksanakan secara terbuka dan efektif</p> <p>2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pada pelaksanaan anggaran</p>	<p>Skala Interval (1-5)</p>

<p>Sumber : (Sindrila Dwita,2021)</p>	<p>5. Pemantauan Pengendalian Intern</p>	<p>desa secara berkala dan berkesinambungan terhadap SISKEUDES</p> <p>3. Pemerintah desa memiliki struktur organisasi, tugas, dan wewenang yang jelas</p> <p>4. Memiliki rencana pengelolaan dalam mengurangi resiko pelanggaran</p>	
---	--	--	--

3.7 Teknik Analisis Data

Adapun dalam menganalisis data dalam penelitian ini terdiri dari tahapan sebagai berikut:

3.7.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan alat statistik yang akan digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2020). Metode analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi atas gambaran yang berkaitan dengan variabel penelitian yaitu Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan

Pelatihan, Peran Pendamping Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sedangkan variabel dependen atau variabel terikat (Y) Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa. Adapun uji persyaratan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan sebelum pengujian regresi. Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji data yang akan diteliti. Data yang akan digunakan dalam penelitian harus memenuhi syarat sebagai data yang terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikoloniaritas dan heteroskedastisitas melalui uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik tersebut terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas.

a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk mengetahui adanya kondisi normalitas pada data penelitian ini, peneliti menggunakan statistik One Sample Kolmogorov- Smirnov Test. Diperoleh taraf signifikan sebagai berikut:

- 1) Nilai signifikansi atau nilai probabilitas $\leq 0,05$, maka distribusi dikategorikan tidak normal.
- 2) Nilai signifikansi atau nilai probabilitas $> 0,05$, maka distribusi dikategorikan normal.

b) Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

Jika VIF yang dihasilkan diantara 1–10 maka tidak terjadi multikolinieritas (Devi Hapsari, 2020). Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. $VIF > 10$: artinya, terdapat gejala multikolinearitas.
2. $VIF < 10$: artinya, tidak terdapat gejala multikolinearitas.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Konsekuensinya adanya heteroskedastisitas dalam model regresi adalah penaksir yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel kecil atau besar.

Salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya gejala heteroskodastisitas adalah dengan melihat pada grafik *scatter plot* (Devi Hapsari, 2020).

Uji ini pada dasarnya bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi kesalahan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap.

Dasar analisisnya sebagai berikut :

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian

menyempit), maka uji tersebut mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah analisis untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan secara parsial atau simultan antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen.

Dalam penelitian ini analisis regresi berganda digunakan untuk memprediksi hubungan antara Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan Dan Pelatihan, Peran Pendamping Desa, dan SPIP terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa..

Adapun persamaan untuk menguji hipotesis sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e.....(1)$$

Keterangan :

- Y = Efektifitas penggnaan SISKEUDES
a = Nilai Konstanta, yaitu besarnya Y bila X = 0
b = Koefisien regresi dari variabel bebas
X1 = Kualitas sumberdaya manusia
X2 = Tingkat pendidikan dan Pelatihan
X3 = Peran Pendamping Desa

X4 = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

e = Standar eror

a) Uji Parsial (Uji T)

Uji statistikt pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} .

Untuk menentukan nilai t_{tabel} ditentukan taraf signifikan 5% ($\alpha = 0,05$) yang memiliki tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) (Devi Hapsari, 2020), sebagai berikut:

1. Jika $sig > 0,05$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima atau H_a ditolak ini berarti menyatakan tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika $sig \leq 0,05$ atau $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka H_0 ditolak atau H_a diterima ini berarti menyatakan ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

b) Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen atau terikat dengan membandingkan F hitung dengan F table yang memiliki tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$).

1. Jika nilai signifikan $> 0,05$ atau $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$ maka variabel independen tidak berpengaruh secara bersama terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ atau $F\text{-hitung} \geq F\text{-tabel}$ maka variabel independen berpengaruh secara bersama terhadap variabel dependen.

c) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen (bebas) dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.